

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
BENCANA SOSIAL PADA KORBAN TERDAMPAK
KEBAKARAN DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**NIKEN SEFTIANI
07011381823139**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Niken Seftiani
NIM : 07011381823139
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 5 September 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Sosial pada
Korban terdampak Kebakaran di Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam penambahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak beneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang , Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Niken Seftiani
07011381823139

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
BENCANA SOSIAL PADA KORBAN TERDAMPAK
KEBAKARAN DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

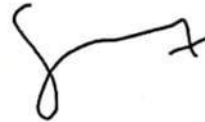
Oleh:

**NIKEN SEFTIANI
07011381823139**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

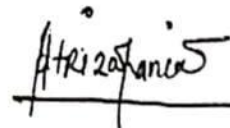
Pembimbing I

**Drs. Gatot Budiarto, MS.
NIP. 195806091984031002**



Pembimbing II

**Dr. Katriza Imania, M.Si
196810221997022001**



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
BENCANA SOSIAL PADA KORBAN TERDAMPAK
KEBAKARAN DI KOTA PALEMBANG**

Skripsi

Oleh :

**NIKEN SEFTIANI
07011381823139**

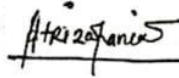
**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 30 Juni 2022**

Pembimbing:

1. Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP.195806091984031002



2. Dr. Katriza Imania, M. Si
NIP.196810221997022001



Penguji:

1. Annada Nasyaya, S. IP., M. Si
NIP.198809062019032016

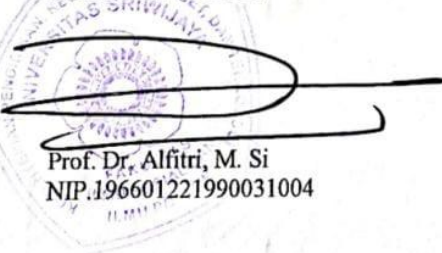


2. Anang Dwi Santoso, S. AP., M.P.A
NIP.199310072019031012



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M. Si
NIP.196601221990031004

**Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

MOTTO PERSEMBAHAN

“Jika saya mencoba yang terbaik dan gagal, setidaknya saya telah melakukan yang terbaik”

(Steve Jobs)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku (Papa Ahmad Idris dan Mama saya Padilah) sebagai motivasi dan selalu mendukung dalam hal apapun.
2. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Almamater yang menjadi kebanggaanku
4. Teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018
5. Seluruh staf dan karyawan FISIP UNSRI

ABSTRACT

The title of this research is "Implementation of Social Disaster Management Policies for Victims Affected by Fire in Palembang City". This research was motivated by the limited number of taganas, frequent inaccuracies of data, lack of community participation in psychosocial support service activities and persuading victims to relocate to settlements. The purpose of this research is to find out how to implement social disaster management policies for victims affected by fire in Palembang city. Qualitative research approach with descriptive method; data collection is done by means of interviews, observation, and documentation. The theory used in this research is the theory of policy implementation from George C. Edward III, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results showed that the implementation of social disaster management policies for victims affected by fire in the city of Palembang had not run optimally in the sub-aspects of staff resources, facilities and fragmentation, but in the communication aspect, disposition had run optimally. Suggestions that can be given from the results of the research are that the number of members should be added so that when helping victims at the location of fire victims there is no shortage of members, improve asset facilities so that more vehicles are used to distribute aid, and the agency should make a letter of agreement with the agencies involved.

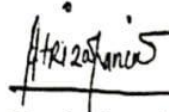
Keywords: Implementation, Disaster Management, Social.

ADVISOR I



Drs. Gatot Budiarto, MS.
NIP. 195806091984031002

ADVISOR II



Dr. Katriza Imania, M. Si
NIP. 196810221997022001

Palembang, Juni 2022

**Chairman of the Department of Public Administration
Faculty Social and Political Science
University Of Sriwijaya**



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Judul penelitian ini “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Sosial pada Korban terdampak Kebakaran di Kota Palembang”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya jumlah tagana, sering terjadi ketidakakuratan data, kurang partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan dukungan psikososial dan membujuk korban untuk relokasi pemukiman. Tujuan dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Sosial pada Korban terdampak Kebakaran di Kota Palembang. Pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif; pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Sosial pada Korban terdampak Kebakaran di Kota Palembang belum berjalan maksimal pada subaspek sumber daya staf, fasilitas dan fragmentasi namun pada aspek komunikasi, disposisi sudah berjalan maksimal. Saran yang dapat diberikan hasil penelitian adalah seharusnya ditambahkan jumlah anggotanya agar saat membantu korban dilokasi korban kebakaran tidak kekurangan anggota, perbaiki fasilitas aset agar lebih kendaraan yang digunakan untuk menyalurkan bantuan, dan sebaiknya instansi membuat surat perjanjian dengan instansi terlibat.

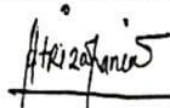
Kata Kunci: Implementasi, Penanggulangan Bencana, Sosial.

PEMBIMBING I



Drs. Gatot Budiarto, MS.
NIP. 195806091984031002

PEMBIMBING II



Dr. Katriza Imania, M. Si
NIP. 196810221997022001

Palembang, Juni 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi dan kedua orang tuaku Papa dan Mama yang selalu memotivasi dan mendoakan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Sosial pada Korban terdampak Kebakaran di Kota Palembang”**. Penyusunan Skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang berkaitan dalam penyelesaian usulan penelitian, dan dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran dan bimbingan serta membagi ilmunya guna kelancaran skripsi saya.
5. Ibu Dr. Katriza Imania, M. Si selaku Pembimbing II yang telah banyak untuk memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya, membagi ilmunya dan membantu saya untuk kelancaran skripsi saya.
6. Bapak Ardiyan Saptawan, M. Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada saya selama masa studi perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya bapak dan ibu Dosen Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan selama masa studi perkuliahan saya.
8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Ilmu Administrasi Publik yang selalu membantu dan memberikan informasi mengenai persoalan perkuliahan selama ini.
9. Dimas Febrianto yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama masa perkuliahan saya.
10. Semua teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018 yang telah menghabiskan waktunya bersama-sama di masa perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kelemahan, kekurangan maupun suatu kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar penulis dapat menjadi lebih baik dalam penulisan.

Palembang,

Niken Seftiani
NIM. 07011381823139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI	iv
MOTTO PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Konsep dan Teori	7
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	7
2. Implementasi Kebijakan.....	8
3. Penanggulangan Bencana Sosial.....	17
B. Teori yang Digunakan dalam Penelitian	18
C. Penelitian Terdahulu	23
D. Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Definisi Konsep.....	38
C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	40

E. Informan Penelitian.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Teknik Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.....	45
1. Sejarah Singkat.....	45
2. Letak Geografis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.....	45
3. Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.....	46
4. Tujuan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	47
5. Uraian Tugas dan Fungsi	47
6. Susunan Organisasi	69
B. Hasil dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Sosial pada Korban terdampak Kebakaran di Kota Palembang	72
1. Hasil Penelitian.....	72
2. Pembahasan.....	117
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Bantuan Bencana Kebakaran Tahun 2017-2021	3
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3 Fokus Penelitian	40
Tabel 4 Informan Penelitian	41
Tabel 5 Jenjang Tagana Provinsi Sumatera Selatan	86
Tabel 6 Spesifikasi Keahlian Tagana Provinsi Sumatera Selatan	86
Tabel 7 Matriks Hasil dan Pembahasan	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier	13
Gambar 2 Model Implementasi Kebijakan Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn..	14
Gambar 3 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III	17
Gambar 4 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 5 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.....	71
Gambar 6 Media Penyampaian Transmisi Komunikasi	75
Gambar 7 Penyampaian Transmisi Komunikasi Data.....	76
Gambar 8 Data Mohon Bantuan ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.....	79
Gambar 9 Anggota Tagana Sumatera Selatan	85
Gambar 10 Jumlah Staf dan Anggota Tagana Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.....	86
Gambar 11. Staf dan Anggota Tagana Sumatera Selatan.....	87
Gambar 12 Rapat dan Sosialisasi Informasi Penanggulangan Bencana Oleh Staf dan Tagana Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	91
Gambar 13 Informasi Tertulis Mengenai Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Sosial Provinsi	92
Gambar 14 Tugas Anggota Tagana Sumatera Selatan	95
Gambar 15 Wewenang Surat Tugas Dari Kepala Dinas	95
Gambar 16 Fasilitas Bantuan Terhadap Korban Bencana Kebakaran	101
Gambar 17 Surat Keputusan Pemberian Insentif Terhadap Pelaksana Tagana	108
Gambar 18 Atm Tagana Dari Kementerian Sosial	108
Gambar 19 Piagam Penghargaan Anggota Tagana Sumatera Selatan	109
Gambar 20 Penyaluran Bantuan Sosial	112

DAFTAR ISTILAH

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DINSOS	: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
DAMKAR	: Pemadam Kebakaran
KEMENSOS	: Kementerian Sosial
MOU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PSKS	: Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
PERMENSOS	: Peraturan Menteri Sosial
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PMI	: Palang Merah Indonesia
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
RI	: Republik Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Struktur Oprasional Prosedur
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
SPM	: Surat Perintah Membayar
SUMSEL	: Sumatera Selatan
TAGANA	: Taruna Siaga Bencana
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	127
Lampiran 2 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi	128
Lampiran 3 Kartu Bimbingan Seminar Proposal Dosen Pembimbing I	130
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Seminar Proposal Dosen Pembimbing II	131
Lampiran 5 Lembar Revisi Seminar Proposal Dosen Pembimbing I.....	132
Lampiran 6 Lembar Revisi Seminar Proposal Dosen Pembimbing II	133
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I	134
Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II	135
Lampiran 9 Surat Izin Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	136
Lampiran 10 Surat Balasan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	137
Lampiran 11 Pedoman Wawancara Ke Instansi.....	138
Lampiran 12 Pedoman Wawancara Ke RT	139
Lampiran 13 Data Permohonan Bantuan ke Dinsos Provinsi Sumsel.....	140
Lampiran 14 Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial Provinsi	142
Lampiran 15 Tugas Anggota Tagana Sumsel.....	145
Lampiran 16 Wewenang Surat Tugas	148
Lampiran 17 Data Fasilitas Bantuan	149
Lampiran 18 Surat Keputusan Pemberian Insentif.....	152
Lampiran 19 SOP Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial	154
Lampiran 20 Dokumentasi Penelitian	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab memberikan layanan dan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari bencana, baik bencana alam dan bencana sosial. RI (2020) menyatakan bahwa Bencana alam merupakan suatu peristiwa antara lain akibat gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana sosial yaitu suatu peristiwa yang diakibatkan oleh ulah manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, kebakaran pemukiman, teror, dan sabotase. Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang jauh dari permukaan daerah rawan kejadian alam, namun yang sering terjadi dikalangan masyarakat Kota Palembang akibat ulah kelalaian manusia sehingga menyebabkan kebakaran pemukiman. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, sebagai pelaksana di tingkat pusat bertanggung jawab atas tugas dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang dimana terdapat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas dan asas tugas pembantuan. Selanjutnya, dalam kerangka desentralisasi maka sebagian tugas Kemensos RI penanggulangan dan perlindungan kepada korban setelah bencana sehingga menjadi bencana sosial dilimpahkan kepada setiap Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia, salah satunya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan berperan dalam penanggulangan bencana sebagai koordinator bidang perlindungan, pengungsian dan sebagai wakil koordinator bidang logistik dalam memberikan bantuan atau menanggulangi bencana kepada setiap korban bencana sosial untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat. Bentuk bencana sosial yang menjadi kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yaitu bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial, aksi teror, kebakaran pemukiman dan sabotase dengan memberikan bantuan sosial bagi korban bencana sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.

Kegiatan penyaluran bantuan bagi korban bencana kebakaran pemukiman dengan jumlah korban jiwa lebih dari 51 orang maka dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk menyalurkan atau memberikan bantuan kepada korban kebakaran, sedangkan apabila korban jiwa dibawah 51 orang maka Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Artinya, cakupan pemberian layanan penyaluran bantuan kepada keluarga korban kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan lebih banyak dibandingkan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Alasan inilah yang mendorong peneliti melakukan studi di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Fungsi dan peran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam penanggulangan bencana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk memberikan perlindungan sosial korban bencana kebakaran. Terkait menanggulangi bencana korban terdampak kebakaran yang telah dilaksanakan termasuk dalam pascabencana pada saat telah bencana

yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi tanggung jawab Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

Salah satu bentuk bencana yang diakibatkan ulah manusia adalah bencana kebakaran. Cakupannya bisa terjadi pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh korban terdampak kebakaran akan mendapat bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera. Bantuan bencana kebakaran yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan ditunjukkan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Bantuan Bencana Kebakaran Tahun 2017-2021

NO.	KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021	JUMLAH
1.	Banyuasin	9	20	2	6	18	55
2.	Empat Lawang	10	20	17	5	3	55
3.	Lubuklinggau	7	1	4	2	3	17
4.	Pagaralam	4	6	3	3	7	23
5.	Palembang	14	34	53	52	51	204
6.	Prabumulih	4	5	3	2	7	21
7.	Lahat	3	8	6	10	7	34
8.	Muara Enim	6	19	13	8	5	51
9.	Musi Banyuasin	5	21	8	22	25	81
10.	Musi Rawas	2	4	2	1	2	11
11.	Musi Rawas Utara	3	2	14	7	6	32
12.	Ogan Ilir	4	9	13	13	17	56
13.	Ogan Komering Ilir	3	2	2	3	9	19
14.	Ogan Komering Ulu	6	4	2	1	12	25
15.	Ogan Komering Ulu Selatan	7	12	17	22	14	72
16.	Ogan Komering Ulu Timur	3	12	3	3	2	23
17.	Pali	3	11	4	9	5	32
JUMLAH		93	190	166	169	193	811

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, 2021.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan bantuan terhadap korban terdampak kebakaran sebanyak 811 kali. Hal ini berarti selama lima tahun terakhir telah terjadi 811 kali kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan. Kasus kebakaran terbanyak setiap tahun terjadi di Kota Palembang. Fenomena ini menarik untuk diteliti dan dengan alasan inilah maka Kota Palembang dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penanggulangan bencana telah banyak diteliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Londok (2014) yang mengkaji

penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan bencana (suatu studi di badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Khaldun & Tawil (2019) mengkaji penelitian mengenai analisis kebijakan penanggulangan bencana (studi kasus perda Kota Palu nomor 5 tahun 2011, Syarif & Unde (2014) yang mengkaji penelitian tentang pentingnya komunikasi dan informasi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar, Fitrianto (2020) mengkaji mengenai evaluasi kebijakan penanggulangan bencana (studi pada bpbd Kabupaten Kediri), Setyowati & Suryaningsih (2018) meneliti tentang implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Semarang, dan Harera & Hidayat (2018) mengkaji persoalan implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Palembang. Namun belum banyak yang mengkaji tentang penanggulangan bencana sosial terkait kebakaran di Kota Palembang. Penggunaan teori implementasi kebijakan dengan lokus Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menjadi kebaruan penelitian ini.

Secara teoritis, implementasi suatu kebijakan akan ditentukan oleh beberapa faktor. Permasalahan dalam implementasi dapat menghambat keberhasilan implementasi tersebut. Demikian juga dengan implementasi penanggulangan bencana kebakaran.

Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan anggota forum komunikasi tagana dalam penanggulangan bencana pada hari jumat, 10 desember 2021 diketahui bahwa:

“Permasalahan dalam menanggulangi bencana yang sering terjadi di Kota Palembang yaitu ketidakakuratan data, terbatasnya jumlah tagana, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan dukungan psikososial, dan sulitnya membujuk korban masyarakat untuk dilakukan relokasi pemukiman”.

Berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran yang terjadi di Kota Palembang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut menjadi tidak maksimal. Menurut George C. Edward III dalam Nugroho (2017:747) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi yang berkaitan

dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat dalam keberhasilan. Komunikasi sangat diperlukan untuk penyampaian informasi sehingga dengan mendapatkan informasi bisa melaksanakan penanggulangan bencana kepada korban. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung khususnya sumber daya manusia untuk *carry out* secara efektif pada keberhasilan sumber daya dapat berpengaruh untuk menanggulangi bencana baik itu sumber daya manusia, fasilitas yang diberikan, serta sarana dan prasarana karena sumber daya sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana kepada korban terdampak kebakaran tanpa adanya sumber daya tidak akan terlaksanakan kebijakan tersebut dalam menyalurkan bantuan. Disposisi berkenaan dengan kesediaan para implementor untuk *carry out* kebijakan dalam suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar terlaksanakan kebijakan tersebut harus memiliki komitmen dan ketersediaan para pelaksana dalam menanggulangi bencana kepada korban kebakaran. Struktur birokrasi berkenaan dengan kemampuan organisasi birokrasi pelaksana kebijakan. Proses implementasi kebijakan akan makin efektif apabila organisasi mampu mengkoordinasi semua pihak terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Sosial pada Korban terdampak Kebakaran di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Sosial pada Korban terdampak Kebakaran di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan mengembangkan Ilmu Administrasi Publik khususnya terkait implementasi kebijakan penanggulangan bencana sosial pada korban terdampak kebakaran di Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan Tagana Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam penanggulangan bencana sosial, khususnya kebakaran di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y. Y. (2016). Teori dan analisis kebijakan publik. Alfabeta.
- Agustino, L. (2017). Dasar-dasar kebijakan publik (edisi revisi). Alfabeta.
- Alamsyah, K. (2016). Kebijakan publik konsep dan aplikasi. Media Citra Mandiri Press.
- Anggara, S. (2018). *Pengantar kebijakan publik*. PT. Pustaka Setia Bandung.
- Arifin, A. (2020). Efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan bencana kabut asap di kota ontianak. *Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(2), 189–208. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapura/article/view/43654/75676587823>
- Falaq, Y., Jannah, M. R., & Rohmatunnisa, R. (2021). Manajemen bencana oleh badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) dalam menanggulangi banjir di desa niaso muaro jambi. *Jurnal National Conference on Educational Science and Counseling*, 1(1), 71–80. <http://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/NCESCO/article/view/5/pdf>
- Fitrianto, M. R. (2020). Evaluasi kebijakan penanggulangan bencana (studi pada bpbd kabupaten bediri). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(2), 197–201. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/download/970/1429>
- Fransari, E., Warouw, S. P., & Brahmana, N. E. (2021). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di masyarakat kota medan tahun 2020. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 11(2), 201–211. <http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/1250/970>
- Hakam, A. M., & Harsasto, P. (2019). Evaluasi proses kebijakan penanganan banjir rob di kota semarang oleh pemerintah kota searang. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(01), 281–290. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/22798/20846>
- Harera, F. W., & Hidayat, Z. (2018). Implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di kota semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/20108/18977>
- Heryati, S. (2020). Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik*, 2(2), 139–146. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/1088/699>
- Hutomo F, A. (2021). Kajian faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan penanggulangan bencana (studi kasus tentang penanganan prabencana banjir bandang di kecamatan panti dan silo. Universitas Jember.
- Iasha, C. (2020). Implementasi kebijakan penempatan pos-pos badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*, 3(1), 1–16. <http://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/27/29>

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana

Khaldun, R. I., & Tawil, Y. P. (2019). Analisis kebijakan penanggulangan bencana (studi kasus perda kota palu nomor 5 tahun 2011). *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 62–68.
<https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG/article/view/32/157>

Lestari, A., & Arsyad, D. H. (2021). Implementasi kebijakan badan penanggulangan bencana daerah di kabupaten toli-toli. *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 16(1), 6125–6130.
<http://ejournal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/1198/pdf>

Londok, C. I. (2014). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana (studi di badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(001), 1–12.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/4502/4031>

Masyhuri, A., Purnaweni, H., Herawati, A. R., & Priyadi, B. P. (2021). Kolaborasi antar stakeholders dalam manajemen bencana tanah longsor di kota semarang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 4(2), 854–862.
<http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/759/pdf>

Meutia, I. F. (2017). Analisis kebijakan publik. CV. Anugrah Utama Raharja.

Mufiz, A. (2016). Pengantar ilmu administrasi negara (edisi 2). Universitas Terbuka.

Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: formulasi, implementasi & evaluasi kebijakan publik*. PT. Leutika Nouvalitera.

NIM, RIZKI, N. P., & Darmawan, D. (2019). Implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap di kota pontianak. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(4), 1–12.
<http://fisipuntan.org/jurnal/index.php/publik/article/view/1559/1513>

Nugroho, R. (2017). *Public policy* (edisi ke 6). PT. Elex Media Komputindo.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota

RI, K. S. (2020). Petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana.

Setyowati, A. C., & Suryaningsih, M. (2018). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di badan penanggulangan

- bencana daerah kabupaten semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 72–88.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/19771/18701>
- Silmi, N. R., Nur, T., & Purwanti, D. (2019). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana daerah di kota Sukabumi. *Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 1(1), 30–40.
<https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOPPAS/article/view/800/521>
- Situmorang, C. H. (2016). Kebijakan publik (teori analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan). Social Security Development Institute.
- Subarsono, A. (2005). Analisis kebijakan publik (cetakan 1). Pustaka Pelajar.
- Subianto, A. (2012). Kebijakan publik tinjauan perencanaan implementasi dan evaluasi. Brilliant.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Alfabeta.
- Suri, N. K. (2016). Analisis kinerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Karo dalam upaya penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo. *Jurnal Perspektif*, 5(1), 457–477.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/172/124>
- Syarif, A., & Unde, A. A. (2014). Pentingnya komunikasi dan informasi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(3), 142–152.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/583/406>
- Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Kapabilitas badan penanggulangan bencana daerah kota balikpapan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 398–407. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/1733/1048>
- Tachjan. (2006). Implementasi kebijakan publik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Tahir, A. (2011). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah. PT. Pustaka Indonesia Press.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Wangka, A. S., Gosal, R., & Sumampouw, I. (2018). Efektifitas badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi bencana banjir bandang di kecamatan tahuna barat kabupaten kepulauan sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20065/19671>
- Widyaningsih, H. W. T. (2021). Manajemen kolaboratif dalam penanggulangan bencana daerah di kabupaten banjarnegara. *Jurnal Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 116–133. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/ppmi/article/view/3202/2063>